Tinjauan Mata Kuliah

Buku Materi Pokok (BMP) *Birokrasi dan Governansi Publik* ini akan menguraikan secara komprehensif semua permasalahan yang berhubungan dengan birokrasi dan governansi publik. Permasalahan birokrasi tidak terlepas dari konsep dasar birokrasi dari Weber sehingga semua kajian birokrasi orientasinya tidak terlepas dari konsep dasar Weber karena Weber merupakan peletak dasar birokrasi yang diselenggarakan pada saat ini dan juga cakupannya di seluruh birokrasi pemerintahan di seluruh dunia.

Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan sehari-hari karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup secara berpemerintahan tidak berhubungan dengan birokrasi dan sekaligus bersentuhan dengan pelayanan yang diberikan oleh birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik sewaktu kita akan mengurus keperluan yang terkait dengan pemerintahan.

Birokrasi dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian, kecenderungan mengenai konsep dan praktik birokrasi telah mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh dunia yang saling terkait satu dengan lainnya atau istilahnya dunia sudah dipengaruhi globalisasi. Globalisasi memengaruhi berbagai sendi kehidupan birokrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Dengan bentuk organisasi yang pada umumnya besar termasuk luas wilayahnya sehingga masalah birokrasi dan governansi publik pun menjadi semakin dinamis sekaligus kompleks mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum.

Bahasan birokrasi dan governansi publik sangat penting bagi mahasiswa yang mengambil bidang keilmuan ilmu administrasi atau khususnya administrasi publik/ negara. Mahasiswa perlu memahami konteks kajian yang terkait dengan negara sebagai institusi atau organisasi yang penting dan birokrat atau aparatur birokrasinya sebagai perangkat birokrasi yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan publik atau masyarakatnya. Tidak ada satu negara di dunia pun yang bekerja tanpa kehadiran birokrasi dan sekaligus tidak akan dapat mencapai kesejahteraan warganya tanpa pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrasinya.

Secara umum materi BMP atau lebih tepatnya modul ini dianggap sudah memadai bagi mahasiswa tingkat sarjana, tetapi tentu masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keilmuan dari materi ini. Kesulitan penulis adalah meramu materi yang relatif banyak dengan mempertimbangkan mana materi yang seharusnya cukup untuk dikaji oleh mahasiswa tingkat sarjana.

Hal yang penting adalah selain pertimbangan materi itu sendiri, juga memberikan suatu tampilan yang membuat mahasiswa nyaman dalam membaca seperti dibuatnya suatu ringkasan pada beberapa halaman tertentu atau menyisipkan gambar dan bacaan yang dianggap membantu mahasiswa untuk memahami isi dari modul ini. Sekali lagi, tidak ada kesempurnaan dari suatu produk yang dibuat manusia sehingga saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan modul ini pada masa yang akan datang.

BMP *Birokrasi dan Governansi Publik* (3 SKS) terdiri atas 9 modul. Modul 1 membicarakan konsep dasar dari birokrasi yang digagas oleh Max Weber, sedangkan Modul 2 membahas mengenai lingkungan birokrasi dan perubahan sosial. Pada Modul 3 mengkaji mengenai penyakit atau patologi birokrasi adapun Modul 4 membahas mengenai kepemimpinan birokrasi. Etika birokrasi diuraikan pada Modul 5. Pada Modul 6 menjelaskan tentang kepercayaan publik terhadap birokrasi. Sementara itu, pada Modul 7 menguraikan pengawasan terhadap birokrasi. Governansi publik diuraikan secara jelas pada Modul 8, dan modul terakhir, yaitu Modul 9 menjelaskan segala permasalahan yang menyangkut reformasi birokrasi.

Untuk menggambarkan materi BMP dan alur kajian birokrasi dan governansi publik maka di bawah ini dibuat suatu diagram yang merangkum seluruh materi Modul 1 sampai dengan 9.

Peta Kompetensi
Birokrasi dan Governansi Publik/FSAP4404/3 SKS

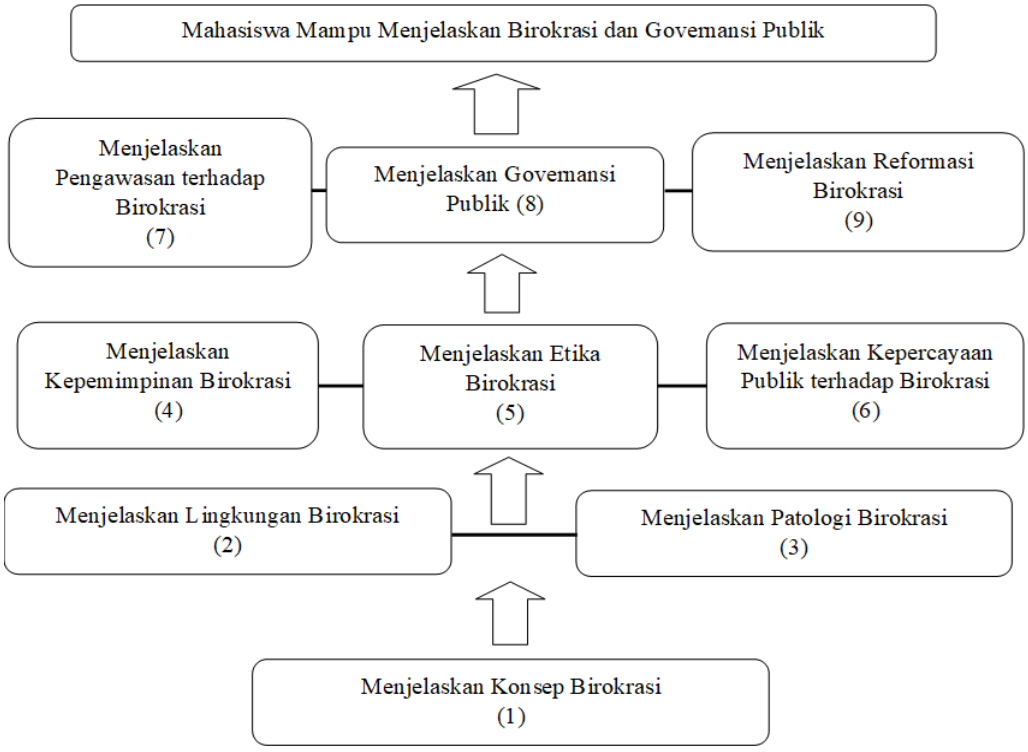

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis masalah-masalah birokrasi di Indonesia sehingga mampu menerapkan teori dan norma-norma dalam birokrasi bila kelak bekerja dalam birokrasi pemerintahan.